

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia menunjukkan rendahnya kualitas masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang sedang tumbuh, Indonesia sedang mencari atau membangun identitas dirinya agar diakui atau diterima sebagai bagian dari bangsa yang modern. Dalam proses menjadi bangsa modern ini, bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Pengaruh paling kuat datang dari budaya Barat yang bercirikan pragmatis, materialistic dan hedonis.

Budaya barat hampir selalu berjalan seiring dengan proses modernisasi yang dilakukan sehingga masyarakat tidak mampu membedakan antara budaya modern dan budaya Barat. Hal ini terjadi karena teknologi informasi telah menjadi instrumen penting dalam menyebarkan berbagai informasi yang sering dijadikan referensi bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Proses tersebut menunjukkan adanya transfer nilai-nilai budaya dari satu masyarakat kepada masyarakat lain. Transfer nilai-nilai budaya, dalam perspektif liberal dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan.

Seiring dengan gencarnya pendidikan Barat melalui berbagai media massa, semakin banyak masyarakat yang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mode busana, musik, film, tata pergaulan hanya sebagian kecil dari fenomena kuatnya pengaruh budaya Barat dalam membentuk perilaku masyarakat. Secara positif, interaksi bangsa

Indonesia dengan Barat juga telah membawa masuk teknologi yang ikut merangsang bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa masyarakat sedang berubah menuju kehidupan yang dianggap lebih maju dan ber peradaban.

Perubahan masyarakat berlangsung dengan dua kemungkinan yaitu menjadi lebih baik, atau sebaliknya menjadi tidak baik. Dalam konteks perubahan inilah, baik pemerintah maupun swasta harus memainkan peran pendidikan yang signifikan dalam menentukan arah perubahan yang sedang berlangsung. Pendidikan dalam hal ini bukan semata-mata dipandang sebagai suatu proses belajar mengajar di kelas. Pendidikan harus dimaknai secara luas sebagai transfer nilai-nilai dari generasi sekarang kepada generasi yang akan datang. Karena itu, proses pendidikan harus meliputi pendidikan informal maupun non formal. Peran organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan dalam pendidikan informal dan non formal sangat besar. Salah satu organisasi yang bergiat dalam pendidikan non formal adalah Aisyiyah. Peran Aisyiyah dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan perkaderan yang selalu diadakan bagi intern Aisyiyah maupun kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat yang ditujukan bagi ekstern Aisyiyah.

Aisyiyah merupakan organisasi yang sebelum tahun 2000 adalah bagian dari organ Muhammadiyah yang hingga saat ini berusaha menunjukkan eksistensi dirinya tanpa harus berada dalam bayang-bayang Muhammadiyah. Aisyiyah memiliki misi yang substansinya adalah memberdayakan perempuan dan memajukan pendidikan. Pemberdayaan

perempuan dan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat di mana misi untuk memberdayakan perempuan hanya mungkin berhasil apabila perempuan dengan mudah dapat mengakses pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Pendidikan yang merata dan berkualitas akan menambah wawasan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah menerima gagasan pentingnya status dan peran perempuan yang lebih baik di tengah keluarga dan masyarakatnya.

Peran Aisyiyah dalam pemberdayaan dan pendidikan telah terbukti sejak awal berdirinya. Bahkan peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan telah dilakukan sebelum didirikan secara resmi tahun 1917, Aisyiyah (waktu itu masih bernama sopo trisno yang berarti siapa suka) telah melakukan tiga program pemberdayaan.

Pertama, membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman dibelakang) bagi suami yang *swarga nunut neraka katut*. Kata *nunut* dan *katut* dalam bahasa jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. Di tengah budaya patriarki itu, Siti Walidah sebagai pendiri Aisyiyah memiliki pandangan bahwa ajaran Islam meletakkan perempuan sejajar dengan laki-laki dihadapan Allah. Pemahaman seperti ini terus diajarkan oleh Siti Walidah kepada murid dan kadernya.

dengan menyatakan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dengan kaum laki-laki.¹

Kedua, memberi beragam bekal keterampilan bagi kaum perempuan. Untuk membangkitkan harga diri kaum perempuan di mata kaum laki-laki, Aisyiyah sejak mulai berdiri berusaha memberi berbagai bekal keterampilan kepada kaum perempuan, sehingga kaum perempuan juga dapat produktif, dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai bekal keterampilan yang dahulu diajarkan oleh Aisyiyah antara lain ketrampilan menjahit, merawat bayi, mengurus rumah tangga, serta berwira usaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.

Ketiga, memberi akses kaum perempuan kepada lembaga pendidikan. Pada masa lalu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya dimiliki oleh kaum bangsawan atau priyayi. Kaum perempuan hampir tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengenyam dunia pendidikan. Oleh karena itu, Aisyiyah merintis mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal maupun keterampilan. Pendidikan yang dikembangkan Aisyiyah tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman tradisional, tetapi juga pelajaran umum seperti berhitung, Bahasa Indonesia dan Ilmu pengetahuan Alam. Dengan tiga program pemberdayaan ini, ditambah program santunan bagi anak yatim, Aisyiyah berkembang dengan pesat. Sejak sebelum masa kemerdekaan,

¹ Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kata Pengantar dalam buku *Keluarga Sakinah dalam Aisyiah Diskursus Lender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan

Aisyiyah dapat dikatakan sebagai organisasi perempuan paling besar dengan jaringan organisasi paling kuat diseluruh Indonesia.²

Peran di atas menunjukkan bahwa Aisyiyah sangat berkompeten terhadap pemberdayaan perempuan. Sampai saat sekarang, Aisyiyah terus berkiprah dalam pemberdayaan perempuan melalui jalur-jalur pendidikan. Perempuan, khususnya ibu, memiliki peran strategis karena pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan dalam Islam pada hakekatnya memandang pendidikan sebagai proses untuk membentuk jati diri manusia sebagai wujud penjelmaan dari kesatuan fungsional khalifah dan 'abd, untuk mengembangkan pengetahuan konseptual dalam berbagai aspek kehidupan manusia, berdasarkan kesadaran dan komitmen yang tinggi pada moralitas.³

Pendidikan dalam Islam adalah proses pembebasan manusia dari kebodohan, kemiskinan dan kekufuran, dengan memperkuat kesadaran atas moralnya untuk memimpin kehidupan di dunia, menciptakan kemakmuran bersama. Ketertinggalan peradaban Islam dari peradaban lainnya sesungguhnya disebabkan ketidakmampuan orang-orang Islam menempatkan pendidikan Islam menjawab tantangan zaman. Ketidakmampuan ini bersumber dari kegagalan pendidikan Islam meletakkan sendi-sendi dasar yang kuat dalam pengembangan islamisasi ilmu pengetahuan (*Islamic civilizational sciences*).

² Ibid, hlm xiii

³ Drs. Hafidz Abb'as, Reformulasi Filosofis Pendidikan Islam, Makalah disampaikan dalam semi loka Prospek Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Transfer nilai-nilai budaya modern yang diiringi dengan budaya Barat telah menghasilkan perkembangan baru di masyarakat berupa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, penerimaan nilai-nilai budaya Barat telah menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak modernisasi. Hal ini tentu juga dirasakan oleh berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk para pemimpin Aisyiyah dengan bersikap hati-hati terhadap dinamika modernisasi. Sikap hati-hati ini memunculkan peran-peran yang cenderung defensif dalam menghadapi modernisasi. Meskipun Aisyiyah maupun Muhammadiyah begitu aktif dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal, proses pendidikan yang ada pada umumnya cenderung defensif. Akibatnya, pendidikan kurang menghasilkan orang-orang yang kreatif seolah-olah proses pendidikan mengisolasi diri dari dinamika masyarakatnya.

Keterisolasian pendidikan Islam dari perkembangan zaman dipicu oleh krisis pemikiran umat Islam terhadap keutuhan ilmu dan agama. Krisis pemikiran itu bersumber dari krisis pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak fungsional terhadap perkembangan zaman. Mata rantai ini berputar sedemikian rupa sehingga pendidikan Islam merupakan sumber dari krisis pemikiran umat dan krisis ini selanjutnya menempatkan umat pada posisi terbelakang dalam perkembangan ekonomi, politik, sosial dan teknologi, umat Islam tertinggal dalam semua aspek kehidupan.

Mencermati uraian di muka, Aisyiyah sebenarnya juga telah berbenah dengan melakukan evaluasi secara berkala. Forum Muktamar Aisyiyah

merupakan mekanisme organisasi yang berfungsi untuk melakukan evaluasi atau otokritik terhadap perjalanan Aisyiyah secara periodik. Evaluasi tersebut sekaligus juga meneguhkan eksistensinya sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap pendidikan.

Pendidikan sebagai proses pengembangan manusia secara makro meliputi prases-proses pembudayaan, yaitu proses transformasi nilai-nilai budaya yang menyangkut nilai-nilai etis, estetis, dan budaya, serta wawasan kebangsaan. Dalam rangka terbinanya manusia berbudaya. Pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan menyusun kurikulum yang memadai, tertata dengan baik, materi yang dapat mendukung tujuan yang jelas. Langkah ini diawali dari keluarga sebagai wadah pendidikan pertama dan utama. Kemudian dilanjutkan dilingkungan tempat tinggal oleh tokoh masyarakat, ulama serta guru di sekolah atau lembaga pendidikan.

Dilihat dari perspektif pendidikan, krisis peradaban yang menerpa bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan praktik pendidikan. Selama ini pendidikan didasarkan pada paradigma pendidikan yang bersifat mekanik-reduksionisme, determinasi, yang bersumberkan pada era teknologi Newton. Paradigma pendidikan ini telah melahirkan berbagai kebijakan pendidikan yang menyebabkan dunia pendidikan semakin terpisah dari masyarakat.⁴

Melihat pentingnya pendidikan bagi masyarakat untuk membangun peradaban manusia itu sendiri, perlu kiranya Aisyiyah menjadikan pendidikan

⁴ Prof. Dr. HAR. Tilaar, M.Sc., ed. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. (Jakarta: PT.

sebagai program strategis organisasinya karena proses pendidikan merupakan proses regenerasi dan pengembangan program kedepan.

Seperti diuraikan di atas, Aisyiyah dalam pendidikan sejak awal berdirinya lebih banyak bergerak dalam pendidikan non formal khususnya melalui forum-forum pengajian dan kursus keterampilan untuk perempuan. Arah dari pendidikan non formal tersebut adalah untuk membekali kaum perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berdiri sejajar dengan laki-laki yang lebih mudah mendapatkan pendidikan melalui jalur formal. Sampai saat ini, Aisyiyah tetap konsisten menjadikan jalur pendidikan non formal sebagai instrumen pemberdayaan perempuan. Bentuk-bentuk kegiatan pendidikan non formal tersebut antara lain: qoryah tayyibah, dakwah bil hal, dakwah jamaah, pembinaan muallaf, bimbingan haji, pembinaan anak asuh, pembinaan mubalighat, dan pembinaan keluarga sakinah.⁵

Jalur pendidikan formal yang dijalankan adalah pendidikan pra sekolah seperti Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).⁶ Peran-peran Aisyiyah dari periode ke periode kepengurusan terus dipertegas dan diperluas. Hasil Muktamar Aisyiyah ke 45 menegaskan kembali komitmen Aisyiyah dengan tetap memasukkan bidang tabligh, pembinaan keluarga dan anak, pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan

⁵ PP Aisyiyah, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah, Yogyakarta, hal 62-65

⁶ Ibid, hal 70

politik dan pengembangan masyarakat, kebudayaan, hukum, dan penelitian dan pengembangan.⁷

Dilihat dari misi pemberdayaan yang sejak awal berdirinya telah dinyatakan oleh Aisyiyah, berbagai kegiatan yang dirumuskan Aisyiyah menunjukkan adanya perluasan peran perempuan ke sektor-sektor publik. Pada kenyataannya, kegiatan-kegiatan Aisyiyah yang tampak di tingkat Aisyiyah di tingkat wilayah, tingkat daerah dan di tingkat ranting lebih banyak bersifat rutinitas. Lebih dari itu, kegiatan yang dijalankan merupakan kegiatan yang dapat dikatakan eksklusif karena tidak melibatkan laki-laki sehingga tampak kegiatan Aisyiyah hanya untuk kaum perempuan dan oleh kaum perempuan. Upaya memberdayakan perempuan dengan memberikan pada perempuan akses untuk memasuki peran-peran publik ternyata hanya kepanjangan tangan dari peran domestik yang selama ini dijalankan kaum perempuan. Pilihan kegiatan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pra sekolah melalui TK ABA, pembinaan keluarga sakinah, pembinaan kesejahteraan masyarakat, tabligh dan sebagainya secara substansial menegaskan peran-peran domestik perempuan.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar pemikiran yang melatar belakangi penelitian di atas, hal ini dipandang perlu oleh penulis sebagai bahan kajian yang relevan dan menarik.

⁷ Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tanfidz Keputusan Mukhtamar Aisyiyah ke- 45 di Malang, Yogyakarta, 2005 hlm 32 – 35.

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Aisyiyah dalam memberdayakan perempuan melalui jalur pendidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mempelajari sejarah Aisyiah sebagai organisasi yang menghimpun perempuan Indonesia dalam peranannya menghantarkan masyarakat dalam bidang pendidikan yang dikelola secara formal maupun non formal, khususnya mempersiapkan kader penerusnya yang mampu menghadapi dan menyelesaikan tantangan organisasi dimasa datang. Dengan rumusan:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Aisyiyah dalam bidang pendidikan
2. Untuk mendapatkan gambaran peran Aisyiyah dalam memberdayakan perempuan melalui jalur pendidikan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan dunia pendidikan pada umumnya dan Organisasi Aisyiyah khususnya dalam rangka:

1. Mengembangkan ilmu pendidikan psikologi Islam, khususnya dalam aspek teori yang berhubungan dengan pendidikan bagi perempuan.
2. Menyusun program organisasi bidang pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Berperan langsung untuk menjadikan Amal Usahanya sebagai wadah mempersiapkan kader-kader organisasi yang handal dan profesional.

tal ses

tal balu

D. Tinjauan Pustaka

Setelah diadakan penelitian kepustakaan, diketahui bahwa penelitian tentang Aisyiyah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun belum ada yang meneliti tentang peran Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan formal. Beberapa kepustakaan yang menulis tentang Aisyiyah adalah:

1. Penelitian Ismah Salman

Ismah Salman meneliti tentang peran Aisyiyah dalam menyosialisasikan konsep keluarga sakinah di kalangan anggota-anggotanya. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan yaitu: bagaimana konsepsi keluarga sakinah menurut Aisyiyah, bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan, dan apa yang telah berhasil dicapai dalam sosialisasi tersebut. Konsepsi keluarga sakinah menurut Aisyiyah tidak dapat dipisahkan dari perspektif gender untuk melihat kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga. Persepsi gender di kalangan Aisyiyah yang ada di berbagai daerah menunjukkan adanya variasi meskipun prinsip ajaran Islam tetap dipegang teguh di kalangan Aisyiyah. Variasi ini disebabkan adanya pengaruh adat. Sistem patrilineal dalam masyarakat Jawa mempengaruhi persepsi anggota-anggota Aisyiyah yang menempatkan perempuan lebih berarti apabila tetap mementingkan kedudukannya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, kedudukan ibu sangat kuat. Garis keturunan dan penentu pengambilan keputusan dalam keluarga mengikuti

ibu. Meskipun saat ini makin melemah seiring dengan kuatnya peran ayah, sampai sekarang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga masih kuat dalam pengambilan keputusan.⁸

Ismah mengemukakan bahwa Islam mendudukan perempuan dalam dua posisi. Pertama, posisi perempuan sebagai hamba Allah yang melaksanakan tugas dan perintah Allah sama dengan laki-laki. Kedua, posisi perempuan sebagai khalifah Allah yang sama-sama berperan dengan laki-laki mensejahterakan kehidupan dan menciptakan kedamaian di dunia.⁹ Aisyiyah menempatkan perempuan sebagai pembina keluarga dalam pembentukan keluarga sakinah. Hal ini ditegaskan dengan diterbitkannya buku berjudul "Tuntunan Keluarga Sakinah" oleh PP Aisyiyah tahun 1989.¹⁰

Pembinaan keluarga meliputi pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pembinaan bidang pendidikan sangat penting sebagai sarana mendapatkan ilmu. Karena itu, Aisyiyah sejak awal berdirinya telah mengelola pendidikan bagi perempuan dalam bentuk sekolah Muallimat yang mendidik perempuan untuk menjadi guru maupun mubalighah.¹¹ Dalam perkembangannya, Aisyiyah mengelola sekolah-sekolah formal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Ismah mengemukakan bahwa dalam pengelolaan pendidikan formal

⁸ Prof. Ismah Salman, M.Hum, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiah Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005), hlm.138-141

⁹ Ibid, hlm 117-118

¹⁰ Ibid, hlm 130

¹¹ Ibid, hlm 182

ini, Aisyiyah masih mengalami bias gender yang ditunjukkan dengan hanya mengelola pendidikan formal yang bersifat feminine seperti sekolah keperawatan dan kebidanan.¹²

2. Penelitian Siti Fauziah

Siti Fauziah meneliti tentang pendidikan di Muallimat Muhammadiyah dari perspektif gender. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan oleh Madrasah Muallimat Muhammadiyah dalam Yogyakarta dalam memberdayakan perempuan dan mengapa mengkhhususkan diri pada pendidikan bagi perempuan. Fauziah mengemukakan bahwa Islam telah menjamin adanya keadilan gender. Islam menegaskan bahwa proses penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama diciptakan dari tanah. Meskipun ada perbedaan secara biologis, Al Quraan tidak menonjolkan perbedaan tersebut.

Kesanggupan untuk bertindak dan berprestasi tidak ditentukan oleh kondisi biologis, tetapi oleh rentang sosio-historis dimana manusia berada yaitu perkembangan peradaban dan kebudayaan pada waktu dan tempat tertentu.¹³ Fauziah melihat keadilan gender dalam Islam dilihat dari kedudukan perempuan sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal atau orang yang bertakwa.¹⁴

¹² Ibid, hlm 183

¹³ Siti Fauziah, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta 1990-2002: Studi Pendidikan dari Perspektif Gender. Tesis. IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2002, hlm 33

Sebagai khalifah, merujuk pada berbagai ayat-ayat dalam Al Quraan, istilah khalifah tidak menunjuk pada jenis kelamin tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara sehingga keduanya harus saling berkerjasama.¹⁵

Diungkapkan bahwa sistem pendidikan di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta telah memberikan pendidikan bagi murid-muridnya yang semuanya perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sama dengan yang didapatkan oleh laki-laki. Namun demikian, pendidikan di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta juga memberikan pendidikan-pendidikan yang banyak berkaitan dengan masalah keperempuanan. Pendidikan ini telah mengarahkan murid-murid mengidentifikasi dirinya dengan sifat-sifat kefemininan sehingga menimbulkan bias gender.¹⁶ Munculnya bias gender ini dipengaruhi oleh factor-faktor tafsir agama, budaya, *feminist fobia*, dan kebijakan pemerintah.¹⁷

3. Siti Syamsiyatun

Siti Syamsiyatun meneliti tentang perkembangan wacana gender dalam organisasi perempuan Nasyyatul Aisyiyah. Penelitian ini berusaha mengungkapkan perjuangan Nasyyatul Aisyiyah (NA) dalam perjuangannya mengubah status dan peran perempuan dalam masyarakat

Indonesia serta perkembangan wacana gender di organisasi tersebut.¹⁸ Pada awalnya, NA menjadi organisasi perempuan muda Islam. NA menjadi sarana penyaluran perempuan muda dalam menyampaikan aspirasi dan aktualisasi dirinya sebagai seorang perempuan muda yang muslimah dengan segala aktivitasnya. NA sebagai kumpulan putrid-putri (gadis) muslim banyak melakukan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan kepentingan perempuan muda.

NA pada awalnya merupakan kumpulan gadis-gadis remaja dari siswa-siswa sekolah dasar Muhammadiyah yang ada di Kauman Yogyakarta. Mereka dikumpulkan untuk mendapatkan pendidikan ekstra kurikuler di sekolahnya di bawah naungan Aisyiyah, khususnya pendidikan tentang perempuan¹⁹ Dalam perkembangannya, NA menjadi lembaga otonom di organisasi Muhammadiyah. NA mengangkat isu-isu feminist meskipun harus menghadapi sikap simpati ataupun antipati dari anggota-anggotanya.²⁰

E. Landasan Teori

Penelitian ini difokuskan pada peran Aisyiyah dalam bidang pendidikan, walaupun sudah banyak penelitian tentang pendidikan secara umum maupun pendidikan Islam, tetapi belum peneliti dapatkan penelitian tentang kebijakan bidang pendidikan yang dikelola oleh Aisyiyah. Tinjauan

¹⁸ Siti Syamsiyatun, *Serving Young Islamic Indonesian women: The Development of Gender Discourse in Negeriatul Aisyiyah 1965-2005*, thesis School of Political and Social Inquiry, Monash

pustaka dalam tulisan ini membahas dua konsep pokok yaitu pendidikan dan peran Aisyiyah.

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses transfer nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Definisi ini menguntungkan kaum pragmatisme dan realisme karena gaya hidup, konsumerisme, dan hedonisme akan diakui sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak perlu dilihat sebagai hal yang bertentangan dengan peradaban. Kaum idealis melihat pendidikan tidak sekedar transfer nilai-nilai tapi juga sebagai sarana membentuk kepribadian.²¹ Unsur-unsur kebudayaan memang selalu mengandung unsur ethics (akhlak), esthetics (keindahan), sains dan teknologi. Namun tidak setiap unsur yang ada memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai budaya Islam.

Pendidikan saat ini telah menjadi komoditas ekonomi yang mahal. Motivasi menyelenggarakan pendidikan bukan bagaimana memberikan pendidikan yang membawa misi membangun peradaban tapi telah bergeser kepada keuntungan material. Pendidikan bukan mengarahkan suatu perubahan tapi telah mengikuti suatu *trend* perubahan di masyarakat. Kecenderungan apa yang akan terjadi di bidang ekonomi di masa yang akan datang menjadi alasan mengapa suatu bentuk pendidikan diselenggarakan. Pendidikan pariwisata, pendidikan perhotelan, pendidikan bartender, pendidikan kejuruan, pendidikan pramugari, dan

²¹ Hassan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1985), hlm. 17.

sebagainya. Pendek kata, pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan semacam ini mendapatkan tempat yang terhormat dalam kerangka pertumbuhan kapitalisme.²²

Konsep pendidikan yang hanya mengedepankan aspek ekonomi di atas telah meresahkan masyarakat karena dalam sistem pendidikan tersebut penanaman nilai-nilai kemanusiaan sangat kurang. Manusia dipandang sebagai bagian dari mesin yang harus profesional bekerja dalam suatu sistem ekonomi modern yang kapitalistik. Keresahan ini dirasakan oleh negara-negara industri maju di negara-negara Barat dan negara-negara yang baru memasuki industrialisasi seperti Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, dan sebagainya. Keresahan ini lebih disebabkan sebagai akibat kurangnya penanaman unsur *ethics* atau akhlak.

Dalam Islam, terdapat berbagai konsep pendidikan yang dapat menjelaskan perspektif Islam terhadap pendidikan. Ada banyak tokoh cendekiawan Islam yang menyampaikan pemikiran tentang pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa para tokoh muslim akan mendapat banyak pengaruh dari pemikiran Barat, namun yang perlu dilihat dan dimanfaatkan adalah apa yang mereka sumbangkan tentang kebenaran dan peran akal tidak bertentangan dengan upaya-upaya untuk mencari kebenaran.²³ Karena itu, dalam tulisan ini, pemikiran yang dianggap mewakili pandangan Islam tidak membatasi pada satu atau dua sumber

²² Nur Wahyudin, "Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Persepektif Islam," *Tesis* (Yogyakarta: UMY, 2004), hlm 3

²³ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al Our'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),

saja. Mengikuti pendapat Abdurrahman (1990), membagi dua kelompok pemikiran pendidikan. Pertama, kelompok yang menentang terbukanya pintu bagi pandangan hidup non Islam. Mereka memadukan konsep-konsep non Islam dalam konsep pemikiran pendidikan. Kedua, kelompok pemikir pendidikan tradisional yang mengadopsi pandangan-pandangan Al Quran dalam karya-karya mereka.

Dalam tafsirnya Quraish Shihab²⁴ mengatakan bahwa konsep pendidikan dalam Al Quran dapat dilacak dari fungsi Al Quran sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus (Q.S. 17 : 19). Dalam hal ini, Muhammad yang bertindak sebagai penerima Al Qur'an bertugas untuk menyampaikan petunjuk, menyucikan dan mengajarkan kepada manusia (Q.S. 67 : 2). Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan tugas tersebut adalah pengabdian kepada Allah, Tujuan ini sejalan dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi yaitu untuk memakmurkan bumi. Shihab menjelaskan bahwa untuk menjalankan tugas-tugas kekhilafahan, maka masalah utama adalah bagaimana membina manusia secara utuh baik aspek jasmani dan aspek rohaninya. Secara bersamaan kedua aspek tersebut harus ada dalam setiap tahap pembinaan.²⁵

Pendidikan dalam Islam bertujuan membekali anak didik dengan kemampuan membaca sebagaimana dipesankan dalam konsep iqra' seperti dinyatakan dalam wahyu yang pertama kali diturunkan. Membaca melibatkan proses pengenalan (*cognition*), ingatan (*memory*), pengamatan

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan), 1992, hlm. 46.

²⁵ *Ibid*, hlm. 58.

(*perception*), pengucapan (*verbalization*), pemikiran (*reasoning*), daya kreasi (*creativity*) dan proses fisiologis lainnya.²⁶ Berdasarkan wahyu pertama dapat disimpulkan bahwa sifat pendidikan dalam Ab-Qur'an adalah pendidikan sepanjang hayat. Oleh karena itu, pendidikan nasional perlu menerapkan konsep pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Islam.

Ahli pendidikan, Brubacher, dalam *modern philosophes of education* (1962; 12) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah; *In dynamic and relativistic word, the goal of educative process will be found not outside, but inside the frocess of growth will be its own end. this growth becomes a goal; it is subordinated to nothing save more growth.* (Dalam dunia yang serba dinamis dan relatif, tujuan proses pendidikan tidak dijumpai di luar proses tadi, tetapi dalam proses itu sendiri. Proses pertumbuhan inilah yang menjadi tujuan akhir. Tujuan ini menjadi sebuah tujuan, hal tersebut tidak dibawah oleh apapun kecuali oleh pertumbuhan selanjutnya).²⁷

Paulo Freire tentang pendidikan dan pembebasan manusia dari ketertindasan struktural dan kultural, yang merupakan awal yang baik bagi pengembangan konsepsi dan pemikiran kependidikan Islam yang lebih dinamis dan fungsional dalam menjawab tantangan-tantangan dunia

²⁶ Langgulung, *opcit*, hlm. 27.

²⁷ Prof. Ismah Salman, M.Hum, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiah Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*. (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005, hlm.255.

pendidikan pada umumnya dewasa ini atau diabad 21 M.²⁸ Dapat difahami bahwa pendidikan yang progresif menentang formalisme, kemantapan, kemandegan, dan konservativisme yang ada pada pendidikan lama, yang menjadi warisan kebudayaan abad ke-19 dimana pada waktu itu Aisyiyah berdiri dan mulai berkembang.

Pendidikan dapat dibedakan antara pendidikan formal dan pendidikan informal ataupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diadakan secara sistematis, terstruktur atau berjenjang mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga jenjang yang paling tinggi. Penyelenggara pendidikan formal umumnya adalah pemerintah atau lembaga yang diijinkan atau diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. termasuk dalam pendidikan formal adalah pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMU, hingga perguruan tinggi. Sebaliknya, pendidikan informal dan non formal dilakukan secara tidak berjenjang dan tidak terstruktur dan tidak memiliki standard yang jelas.

Pada abad ke 20, orang mengadakan sistem pendidikan yang pada intinya berdasarkan tiori Reformasi dan Rekonstruksi, karena abad ini ditandai oleh dinamisme dan banyak perubahan serba cepat, bahkan semakin hari semakin cepat.

Dalam berbagai pembahasan dan perumusan konsep tentang reformasi Pendidikan, arah baru pendidikan Nasional yang bisa disebut merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan ahir pendidikan adalah

²⁸ Dr. Muhaimin, MA, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM), 2004), hlm. 9.

mempersiapkan individu anak didik dan warga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan, melembagakan dan mengembangkan masyarakat madani Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijaksanaan pendidikan nasional jangka panjang seharusnya bertumpu pada usaha-usaha: pertama, menjamin kesempatan (*equity*) bagi setiap anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat lingkungan masing-masing, dan pada saat yang sama juga memberi peluang yang luas bagi peningkatan kemampuan pendidikan masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi diversifikasi program pendidikan, kedua; menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat madani dalam menghadapi tantangan global, dan pada saat yang sama juga meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan yang demokratis dan profesional, dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*) bagi masyarakat dan seluruh stakeholders lainnya; keempat, mengurangi peran pemerintah, sehingga lebih merupakan fasilitator dalam implementasi sistem pendidikan, dan pada saat yang sama merampingkan birokrasi pendidikan agar lebih

fleksibel dalam meresponi perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat baik ditingkat nasional maupun global.²⁹

2. Pendidikan Perempuan

Dalam Islam, perintah untuk terus belajar ditegaskan berulang-ulang. Pertama kali perintah untuk belajar adalah ketika turun ayat pertama dengan kata-kata *iqra'* (bacalah), *'allama* (mengajar), *al-qalam* (pena) dan *ya'lam* (mengetahui). Islam mewajibkan kepada setiap orang, baik laki-laki atau perempuan untuk belajar. Dalam hadist diriwayatkan oleh H.R. Buchari: "Siapa saja yang mempunyai anak perempuan lalu ia mengajari dan mendidiknya dengan baik, maka anak itu akan menjadi tabir yang melindunginya dari neraka."³⁰ Hadist ini menjelaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Perempuan memiliki peran sangat penting dalam keluarga. Ada banyak pengertian tentang keluarga seiring dengan perubahan-perubahan sosial yang terus berkembang. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, keluarga didefinisikan sebagai hubungan dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga.³¹ Dilihat dari komposisinya, keluarga dibagi menjadi dua macam. *Nuclear family* atau keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. *Extended family* atau keluarga luas, yaitu keluarga yang anggota-anggotanya terdiri lebih dari keluarga inti.

²⁹ Prof. Dr. Azyumardi Azra, *Paradigma Baru, Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002) hlm. 32.

³⁰ Opcit, Fauziyah, hlm. 58

³¹ Paul B. Horton dan Chester J. Hunt, *Sosiologi Edisi Keenam* (Jakarta: Erlangga 1996) hlm.

Misalnya saja di dalam keluarga tersebut ada sepupu, paman, nenek, keponakan, atau anggota kerabat lainnya.

Keluarga memiliki banyak fungsi terhadap anggota-anggotanya seperti fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, dan fungsi afeksi. Di dalam keluarga, setiap anggota keluarga membutuhkan kasih sayang dan rasa dicintai.³² Menurut Ismah, perempuan berperan penting dalam pembinaan keluarga. pembinaan keluarga meliputi pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pembinaan bidang pendidikan sangat penting sebagai sarana mendapatkan ilmu.³³ Mengingat pentingnya perempuan maka pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap perempuan. Melalui pendidikan perempuan akan mendapatkan ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan, dan mendapatkan akses untuk mendukung perannya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Dengan kata lain, perempuan akan lebih berdaya melalui pendidikan.

3. Perspektif Gender

Perbedaan jenis kelamin sering berkembang menjadi pemahaman tentang gender yang keliru. Pada awalnya gender diartikan sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata-kata, benda, dan kata-kata lain yang berkaitan dengan perbedaan antara dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa

³² Ibid, hlm. 27

³³ Opcit, Ismah, hlm. 182

gender adalah suatu konsep cultural yang berupa membuat perbedaan dalam hal peran, metnalitas dan karteakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁴ Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya sebagai laki-laki atau perempuan yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologisnya sebagai perempuan dan berbagai karakteristik perilakunya yang ia kembangkan sebagai hasil proses sosialisasi.³⁵ Gender dalam dimensi sosial dimaknai sebagai konstruksi sosial yang menjadi pedoman dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga/masyarakat. Menurut Kementerian Urusan Peranan Wanita (1994), gender adalah hubungan dalam bentuk pembagian kerja serta alokasi peranan, kedudukan dan tanggung jawab serta kewajiban, dan pola hubungan yang berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antar budaya.³⁶

Perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, kewajiban, dan pola hubungan begitu kuat melekat di masyarakat dan dijadikan acuan perlakuan bagi perempuan. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak ada persoalan ketidakadilan berdasarkan gender. Ketidakadilan gender baik bagi pria maupun bagi wanita dapat berupa

³⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 34

³⁵ Saparinah Sadli dan Soemartani Patmonodewo, *Identitas Gender dan Peranan Gender dalam T.O. Ihromi (ed) Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995) hlm 76

³⁶ Arif Budiman, *Pembagian Kerja Seksual* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm 56

marginalisasi, subordinasi pengambilan keputusan, stereotype, diskriminasi, pelabelan negatif, dan lain-lainnya.³⁷

4. Pemberdayaan Perempuan

Untuk menghapuskan terjadinya eksploitasi, diskriminasi dan proses marginalisasi yang diperlukan adalah pemberdayaan. Inti strategi pemberdayaan (*empowerment*) dimaknai sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Pemberdayaan yang diupayakan adalah terpenuhinya hak wanita untuk menentukan pilihan dalam hidupnya dalam rangka aktif terlibat dalam mengarahkan perubahan dan kontrol atas sumber daya material dan non material. Persoalan apakah perempuan berada di sektor publik atau privat (domestik) bukan sebuah keputusan yang ditetapkan oleh kekuatan atau dominasi pria, tetapi lebih karena pilihan dan prestasi atau kemampuan dari pihak perempuan.³⁸

Keberadaan perempuan di berbagai jabatan publik jangan sampai dipandang sebagai suatu peluang atau kesempatan yang diberikan oleh kaum laki-laki, tetapi karena kemampuan perempuan.³⁹ Dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terbukanya peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk bergerak di sektor publik. Dalam hal ini dibutuhkan kesediaan masyarakat yang didominasi laki-laki untuk melihat kenyataan bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk

³⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm 24

³⁸ Emy Susanti, *Mengugat Bias Gender dalam Logika Pembangunan*, dalam Idi Subandi Ibrahim dan Hanif Suranto (ed). *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde*

berprestasi. Kedua, meningkatkan kemampuan atau keberdayaan perempuan. Perempuan sudah seharusnya dibuat berdaya atau mempunyai kemampuan untuk mengolah segenap potensinya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah.

Sosialisasi tentang kesetaraan gender dengan demikian harus diikuti dengan pendidikan yang memberdayakan perempuan. Institusi yang bekerja secara sistematis dan intens menjalankan proses pendidikan adalah lembaga-lembaga pendidikan formal. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus dimulai dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk sekolah dan disertai dengan sosialisasi tentang keadilan gender di sekolah-sekolah. Namun, upaya pemberdayaan tidak dengan sendirinya berhasil hanya dengan memberikan akses bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan formal karena secara kultural, pendidikan formal selama ini masih didominasi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superior atas perempuan. Muatan kurikulum yang tercermin pada pelajaran yang diberikan masih memisahkan antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Karena itu, upaya pemberdayaan harus mampu membuka pintu kultural patriarki dengan memberikan wawasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan agar dapat menerima adanya kesetaraan gender. Salah satu upaya strategis yang dilakukan Aisyiyah adalah dengan menggunakan jalur-jalur pendidikan non formal.

Pemberdayaan perempuan tidak berarti mempertentangkan antara dunia privat dengan dunia publik, atau maskulin versus feminine. Dalam konteks masih kuatnya dominasi laki-laki, pemberdayaan perempuan harus dilakukan dengan membangkitkan sensitivitas dan kesadaran gender kaum laki-laki.⁴⁰ Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberdayaan perempuan, yaitu: 1) adanya kemandirian, 2) adanya kekuatan internal perempuan, 3) terbukanya peluang untuk berperan lebih luas di sektor publik.

5. Peran Aisyiyah dalam Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

Peranan berkaitan erat kedudukan atau status. Peranan seseorang atau pun peranan suatu lembaga menunjukkan adanya fungsi atau suatu proses, sedangkan status bersifat statis.⁴¹ Istilah peranan berasal dari kata dasar “peran”. Dalam tulisan ini, peneliti perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan peran Aisyiyah dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan adalah berjalannya fungsi-fungsi Aisyiyah dalam mengemban misi pendidikan dan misi pemberdayaan perempuan.

Misi-misi di atas tercermin dari pernyataan yang dirumuskan oleh Aisyiyah. Sejauhmana peran Aisyiyah dijalankan, dapat diketahui dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan Aisyiyah untuk merealisasikan program kerjanya yang dirumuskan dalam setiap muktamar. Aisyiyah

⁴⁰ Idi Subandy Ibrahim dan Hanif Suranto, *Wanita, Media, Mitos dan Kekuasaan*, pengantar editor pada Idi Subandi Ibrahim dan Hanif Suranto (ed), *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*, Bandung: Rosdakarya, 1998, hlm Liii

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm

menempatkan perempuan sebagai pembina keluarga dalam pembentukan keluarga sakinah.⁴² Masalah pemberdayaan perempuan dan pendidikan dalam perjalanan Aisyiyah sampai saat ini tetap menjadi bidang garap yang utama. Program pendidikan dirumuskan oleh Aisyiyah sebagai wujud kepedulian Aisyiyah terhadap masalah pendidikan di Indonesia dan lemahnya perempuan dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat sebagai akibat kuatnya budaya patriarki. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi serta pendidikan informal yang ditujukan untuk perempuan menunjukkan peranan Aisyiyah dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk melakukan pembahasan yang utuh dan sistematis, maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini bermaksud mengantarkan kepada pembaca untuk memahami latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II menampilkan deskripsi singkat tentang organisasi Aisyiyah. Deskripsi ini meliputi sejarah berikut peran historisnya dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan perempuan, struktur organisasi serta kebijakan-kebijakan organisasi yang berkaitan dengan pendidikan khususnya berdasarkan pada hasil Muktamar Aisyiyah ke-44 dan muktamar Aisyiyah ke-45.

⁴² Ibid, hlm 130

Bab III berisi pembahasan yang mendiskripsikan peran Aisyiyah dalam dunia pendidikan. Pembahasan merujuk dari pendapat-pendapat, baik dari pengurus dan mantan pengurus Aisyiyah maupun dari kalangan pengamat sosial atau pengamat pendidikan, pembahasan juga menjadikan literatur atau dokumen yang relevan sebagai bahan acuan. Pembahasan dipilah menjadi dua aspek utama. Pertama, melihat idealitas Aisyiyah berdasarkan pedoman organisasi yang ada dibandingkan dengan implementasinya dalam memajukan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Bab IV membahas peran Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan yang diadakan oleh Aisyiyah. Pembahasan ini berangkat dari perspektif gender. Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan disertai saran-saran berdasarkan hasil pembahasan pada bab-